



**PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION*, KEPEMILIKAN
TERKONSENTRASI, DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
*TAX AGGRESSIVE***

**Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen yang
Terdaftar di BEI periode 2016-2019.**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

Alvin Ferdyan

NPM : 4316500014

Diajukan Kepada:

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2020



**PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION*, KEPEMILIKAN
TERKONSENTRASI, DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
*TAX AGGRESSIVE***

**Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen yang
Terdaftar di BEI periode 2016-2019**

SKRIPSI


Oleh :

**Alvin Ferdyan
NPM : 4316500014**

**Disetujui Untuk Ujian Skripsi
Tanggal: 15 Januari 2021**

Dosen Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dien Noviany R., SE., MM., Akt. CA
NIDN. 0628117502


Aminul Fajri, SE., M.Si., Akt
NIDN. 0602037002

Mengetahui,

Studi Akuntansi

Aminul Fajri, SE., M.Si., Akt
NIDN. 0602037002

Pengesahan Skripsi

Nama : Alvin Ferdyan
NPM : 4316500014
Judul : Pengaruh *Related Party Transaction*, Kepemilikan
Terkonsentrasi, Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax*
Aggressive Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor
Otomotif & Komponen yang Terdaftar di BEI periode
2016-2019.

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:


Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Januari 2021

Ketua Penguji



Dr. Dien Noviany R., S.E., M.M., Akt., CA
NIDN. 0628117502

Penguji I


Budi Susetvo, S.E., M.Si
NIDN. 0623117101

Penguji II


Aminul Fajri, S.E., M.Si
NIDN. 0602037002

MOTTO

“Tujuan pendidikan adalah untuk menggantikan pikiran kosong menjadi pikiran terbuka”

Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Karnoto dan Ibu Waridah yang senantiasa selalu memberikan semangat, rasa ikhlas dan rasa bertanggungjawab atas tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa.
2. Dosen pembimbing 1 Dien Noviany R, S.E.,MM.,Akt.,CA dan dosen pembimbing 2 Aminul Fajri, S.E.,M.Si.,Akt yang senantiasa membimbing dan memberikan semangat.
3. Sahabat saya Maskur, Amad, dan Farel yang senantiasa memberikan semangat dan menemani dikala proses mengerjakan skripsi ini.
4. Almamaterku.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alvin Ferdyan
NPM : 4316500014
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Related Party Transaction, Kepemilikan Terkonsentrasi, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressive Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tahun 2016-2019”.

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiarasi, manipulasi dan atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengijinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, 19 Januari 2021

Yang menyatakan,

 Alvin Ferdyan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *related party transaction*, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax aggressive*. Variabel yang digunakan penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu hubungan istimewa dengan menggunakan *related party transaction* utang, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu *tax aggressive*.

Penelitian ini menggunakan 12 sampel perusahaan manufaktur subsektor otomotif & komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Alat yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data pada penelitian ini yaitu *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* Versi 22.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *related party transaction* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressive* dengan nilai signifikan 0,086, kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap *tax aggressive* dengan nilai signifikan 0,245, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax aggressive* dengan nilai signifikan 0,123, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax aggressive* dengan nilai signifikan 0,920 dan komite audit berpengaruh terhadap *tax aggressive* dengan nilai signifikan 0,044.

Kata Kunci: *Related Party Transaction*, Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit dan *Tax Aggressive*.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of related party transactions, concentrated ownership, institutional ownership, independent commissioners, and audit committees on tax aggressive. The variables used in this study are the independent variable and the dependent variable. The independent variables used are a special relationship using debt related party transactions, concentrated ownership, institutional ownership, independent commissioners, and audit committee. Meanwhile, the dependent variable used is tax aggressive.

This study uses 12 samples of automotive & component manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019. The sampling method used was purposive sampling method. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The tools used to analyze and process data in this study were Statistical Product and Service Solution (SPSS) Version 22.

The results of this study prove that related party transactions have no effect on tax aggressive with a significant value of 0.086, concentrated ownership has no effect on tax aggressive with a significant value of 0.245, institutional ownership has no effect on tax aggressive with a significant value of 0.123, independent commissioners have no effect on tax aggressive with a significant value of 0.920 and the audit committee has an effect on tax aggressive with a significant value of 0.044.

Keywords: Related Party Transaction, Concentrated Ownership, Institutional Ownership, Independent Commissioner, Audit Committee and Tax Aggressive.

Kata Pengantar

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, barokah, karunia, hidayah serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat mengerjakan proposal penelitian untuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Related Party Transaction*, Kepemilikan Terkonsentrasi, Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Aggressive* Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen yang Terdaftar di BEI periode 2016-2019.”**

Proposal penelitian untuk skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi pada Program Strata (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal penelitian untuk skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E, M.M, Akt, C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Aminul Fajri, S.E, M.Si, selaku kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Kedua orang tua yang selalu mendukung dan memotivasi secara moril maupun secara materiil.
4. Semua pihak yang terkait yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun secara materiil.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan proposal penelitian untuk skripsi ini, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan proposal penelitian untuk skripsi ini. Penulis berharap proposal penelitian untuk skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak – pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 2020

Penulis,

Alvin Ferdyan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	10
2. <i>Tax Aggressive</i>	11
3. <i>Related Party Transaction</i> (RPT).....	14
4. Kepemilikan Terkonsentrasi.....	19
5. Kepemilikan Institusional.....	21
6. Komisaris Independen	22
7. Komite Audit	24
B. Studi Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pemikiran.....	32
D. Perumusan Hipotesis	37

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Populasi dan Sampel	38
C. Definisi Konseptual dan Operasional.....	40
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Metode Analisis Data	44
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	45
2. Uji Asumsi Klasik	45
3. Analisis Regresi Linear Berganda	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
1. Sejarah Bursa Efek Indonesia	50
2. Bursa Efek Indonesia	50
3. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia	52
4. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia	52
B. Hasil Penelitian.....	54
1. Analisis Statistik Deskriptif	54
2. Uji Asumsi Klasik.....	56
a. Uji Normalitas	56
b. Uji Multikolinearitas	58
c. Uji Autokorelasi	59
d. Uji Heteroskedasitas.....	60
3. Analisis Regresi Berganda	61
4. Uji Hipotesis	64
a. Uji Secara Simultan (Uji F)	64
b. Uji Secara Parsial (Uji T)	65
1) Uji Hipotesis Pertama (H1)	66
2) Uji Hipotesis Kedua (H2).....	66
3) Uji Hipotesis Ketiga (H3).....	66
4) Uji Hipotesis Keempat (H4).....	67
5) Uji Hipotesis Kelima (H5).....	67

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	67
C. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
C. Keterbatasan	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel.....	39
Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Tahun 2016-2019	40
Tabel 3.3 Operasional Variabel.....	42
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Data-data Penelitian	55
Tabel 4.2 Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test.....	57
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	58
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	60
Tabel 4.5 Analisis Regresi Linier Berganda	62
Tabel 4.6 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....	64
Tabel 4.7 Hasil Uji Secara Parsial (Uji T).....	65
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi (R^2)	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	36
4.1 Bagan Struktur Organisasi.....	53
4.3 Hasil Uji Normalitas dengan Normal Probability Plots	57
4.4 Hasil Uji Heteroskedasitas	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan pajak penghasilannya kepada negara. Pembayaran pajak penghasilan merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara. Perusahaan sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Wijayani, 2016).

Kepatuhan wajib pajak, biasanya diukur dan dibandingkan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pengurangan-pengurangan insentif pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerjasama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan (Sari, Kalbuana, & Jumadi, 2016).

Pembahasan mengenai penghindaran pajak dan penyelundupan pajak telah banyak dilakukan dalam beberapa literatur, namun hingga saat ini tidak ada satupun yang memberikan indikasi dan rincian yang tegas tentang perbedaan maksud penghindaran pajak dan penyelundupan pajak. Berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar

undang-undang (*lawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*unlawful*). Akan tetapi secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya (Zain, 2008).

Perusahaan-perusahaan yang berdiri saat ini umumnya tidak bertujuan untuk mensejahterakan pemegang sahamnya saja dengan memperoleh laba, perusahaan juga tidak puas dengan menghemat pajak yang sedikit. Dalam prakteknya, perusahaan-perusahaan tersebut akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghemat pajak semaksimal mungkin meski resiko yang akan ditanggung semakin besar juga. Perusahaan melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif. Perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang agresif untuk dapat menghemat pajaknya. Penghematan pajak seperti ini dikenal dengan istilah agresivitas pajak (*tax aggressive*) (Prameswari, 2017).

Tindakan perencanaan pajak yang merupakan tindakan untuk melakukan agresivitas pajak salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau melalui penggelapan pajak (*tax evasion*). Meskipun dalam prakteknya terdapat perbedaan dalam definisi tentang *tax planning* yang dilakukan baik menggunakan *tax sheltering* atau *tax evasion*, tetap saja perusahaan melakukan kegiatan yang melanggar undang-undang dengan melakukan suatu usaha untuk perencanaan pajaknya secara

agresif. Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak yang tepat baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Frank et al. 2009) dalam (Midiastuty, Suranta, & Ramdhan, 2017).

Bentuk lain dari *tax aggressiveness* ialah pencurian yang dilakukan korporasi terhadap besaran pajak terutang yang harus dibayar akibat tingginya tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Contoh nyata kasus Lionel Messi tahun 2007 dan 2009 yang melakukan penggelapan dan penipuan pajak di Spanyol dengan nilai £4 juta dan dikenakan denda sebesar £2 juta. Penyebabnya yakni tarif pajak penghasilan yang terlampau tinggi di Spanyol, sehingga menyebabkan para wajib pajak berpenghasilan besar memalsukan atau mengalihkan pendapatan. Selain tarif pajak yang tinggi, Spanyol juga telah melaksanakan penegakan hukum perpajakan yang ketat dan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan wajib pajak, salah satu keberhasilan hal tersebut terbukti dengan menguaknya kasus Messi. Mengacu pada undang-undang perpajakan, Messi seharusnya melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya sebagai pesepakbola. Ada dua hal utama yang harus dipahami yaitu seluruh penghasilan berarti termasuk penghasilan di luar sepakbola, misalnya *image right*, dan walaupun berkebangsaan Argentina, karena ia bekerja di Spanyol, maka Messi sah terhitung sebagai wajib pajak Spanyol (Andri, 2017)

Salah satu strategi perusahaan terutama perusahaan konglomerasi dan perusahaan multinasional untuk meningkatkan kinerja adalah melakukan

aktivitas *Related Party Transaction* (RPT). Dalam menghasilkan laba yang tinggi, perusahaan harus melakukan berbagai usaha dan diantaranya adalah membuka pabrik baru atau mendirikan anak perusahaan. Transaksi yang terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan disebut dengan transaksi pihak berelasi atau *Related Party Transaction* (RPT), yang pengungkapannya harus dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan induk. RPT merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak seperti perusahaan dalam satu pengendali, perusahaan asosiasi, karyawan kunci, perorangan, atau keluarga dekatnya atau perusahaan yang mempunyai hak suara signifikan. RPT dapat dipandang sebagai transaksi yang mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomis perusahaan (Farahmita, 2011).

Keberadaan transaksi dengan pihak berelasi bukan merupakan suatu hal yang dilarang. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menganggap bahwa transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah transaksi yang normal. Namun mereka mengaku bahwa hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai dampak atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor. Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat melakukan transaksi yang tidak dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Transaksi tersebut bisa dilakukan dengan harga yang berbeda dengan transaksi serupa antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (PSAK no. 7, par.6-7) dalam (Sokarina, 2012).

Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain yang timbul sebagai akibat masalah keagenan (*agency problem*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Konflik keagenan yang terjadi di perusahaan dapat diatasi melalui karakteristik kepemilikan salah satunya kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan grup sebagai perusahaan yang berorientasi laba tentunya akan berusaha untuk mengoptimalkan keuntungan agar dapat mengembangkan bisnis mereka dengan berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efisiensi biaya pajak (Midiastuty, Suranta, & Ramdhan, 2017). Untuk menyelesaikan masalah keagenan ini dibutuhkan suatu tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Untuk mencapai tata kelola yang baik, maka perusahaan harus menciptakan mekanisme *Corporate Governance*.

Mekanisme pengawasan melalui *good corporate governance* selanjutnya adalah direktur independen. Direktur independen bukan berasal dari pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama, dewan direksi perusahaan, maupun komisaris lainnya dalam perusahaan. Sehingga diharapkan keberadaan direktur independen dalam perusahaan dapat mengurangi agresivitas pajak karena adanya pengawasan yang lebih ketat dari direktur independen perusahaan (Midiastuty, Suranta, & Ramdhan, 2017).

Menurut Gusnardi (2009). dalam kegiatan perusahaan tersebut mayoritas berupa transaksi di antara kelompok usaha mereka dan harga yang terjadi tidak mengacu pada harga pasar melainkan berdasarkan kebijakan harga

transfer (*transfer pricing*) oleh *holding company*. Oleh karena itu dalam prakteknya *Transfer Pricing* diartikan upaya yang dilakukan dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu kelompok usaha dengan maksud meminimalkan pajak. Dengan melakukan transaksi RPT sebagai strategi penghindaran pajak, maka dapat menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga dengan kondisi perusahaan di Indonesia yang rata-rata adalah perusahaan milik keluarga menjadikan RPT tersebut sebagai salah satu strategi penghindaran pajak yang banyak dilakukan.

Disisi lain dengan adanya fenomena penghindaran pajak dengan membuat komposisi utang jauh melebihi modal atau disebut dengan skema *thin capitalization* mendorong adanya praktik penyetoran modal terselubung dengan cara memberikan pinjaman yang melampaui batas kewajaran dengan pertimbangan adanya aturan bahwa bunga atas utang berbeda perlakuan perpajakannya dengan dividen atas investasi saham, sehingga bunga atas utang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak, sedangkan bunga atas modal tidak (Yuliati, 2016). Terkait modal dan hutang ini pemerintah telah mengaturnya dalam 169/PMK.010/2015.

Berdasarkan landasan pemikiran, fenomena yang terjadi yang telah dijelaskan dan hasil penelitian yang berbeda-beda, maka peneliti mencoba untuk meneliti kembali yang lebih spesifik terkait masalah tersebut dengan judul **“Pengaruh *Related Party Transaction*, Kepemilikan Terkonsentrasi, Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Aggressive*”**. Objek pada

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor otomotif & komponen yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Related Party Transaction* tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressive*?
2. Apakah Kepemilikan Terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressive*?
3. Apakah Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressive*?
4. Apakah Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressive*?
5. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Aggressive*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui *related party transaction* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressive*?
2. Untuk mengetahui kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap *tax aggressive*?
3. Untuk mengetahui kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax aggressive*?

4. Untuk mengetahui komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax aggressive*?
5. Untuk mengetahui komite audit berpengaruh terhadap *tax aggressive*?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi banyak kalangan maupun pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini sangat bermanfaat bisa menambah informasi, dan wawasan teoritis khususnya tentang pengaruh *related party transaction*, kepemilikan terkonsentrasi, dan *corporate governance* terhadap *tax aggressive*.
- b. Bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya.
- c. Bagi masyarakat, yaitu sebagai sarana informasi mengenai *tax aggressive* khususnya *related party transaction* atau hubungan istimewa, kepemilikan terkonsentrasi, dan *corporate governance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Regulator, khususnya fiskus atau Direktorat Jendral Pajak untuk dapat memberikan bukti empiris yang berhubungan dengan pentingnya pengawasan serta efektivitas peraturan yang dikeluarkan mengenai *related party transaction*, kepemilikan terkonsentrasi, dan *corporate*

governance terhadap tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat meminimalisir kecurangan pembayaran pajak.

- b. Manajemen, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk masukan atau salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan agresivitas pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan versi *game theory* yang mencoba mendapatkan yang terbaik bagi dirinya dengan cara memodelkan proses kontrak antara dua orang atau lebih dan masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak. (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih *principal* mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian agen mendapatkan delegasi wewenang pengambilan keputusan. Agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik *principal* ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymmetry information*) di antara *principal* dengan *agent*, hal tersebut muncul permasalahan sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan.

Hubungan lain teori keagenan dengan penghindaran pajak ini adalah adanya konflik yang terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pembayar pajak (manajemen perusahaan) dengan pemungut pajak (fiskus). Agen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah, sementara dari pihak fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak. (Prakosa, 2014). Hal ini dapat disebabkan oleh pihak

principal yang memberi mandat pada agen untuk meminimalkan pajak perusahaan, sehingga perusahaan membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Apabila agen tidak mematuhi atas kepentingan *principal* maka agen akan menanggung biaya.

Akibat dari masalah keagenan menyebabkan adanya sejumlah biaya yang harus dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Salah satunya adalah *bonding cost* yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan memastikan bahwa manajer dapat mengikuti keinginan dari pemegang saham, sehingga salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan cara karakteristik perusahaan. Pemegang saham yang semakin terkonsentrasi pada satu atau beberapa pemegang saham saja akan mempermudah kontrol terhadap kebijakan yang diambil pengelola perusahaan sehingga dapat mengurangi *asymmetric information* dan mengurangi tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer (Midiastuty, Suranta, & Ramdhan, 2017).

2. Tax Aggressive

Agresivitas pajak merupakan suatu hal yang biasa terjadi di kalangan perusahaan besar di seluruh dunia meskipun sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui strategi perencanaan pajak (*tax planning*) pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, akan tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan

terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan (Sumarsan, 2013). Meminimalkan beban pajak dengan menggunakan tindakan agresivitas pajak atau perencanaan pajak adalah suatu skema transaksi yang umum digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara, legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang dinyatakan oleh ahli pajak.

Tindakan pajak agresif tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan peraturan perpajakan namun, dapat berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga sering kali agresivitas pajak disebut juga sebagai *tax sheltering* atau *tax avoidance*. Pajak agresif dapat berbentuk apapun selama beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya yang dibayarkan (Ridha & Martani, 2014).

Perusahaan dapat melakukan agresivitas pajak dengan cara memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak yang ada pada PPh pasal 6 ayat 1b, misalnya dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap sebagai pengurangan laba kena pajak perusahaan. Dan juga dapat memanfaatkan peraturan PPh pasal 4 ayat 3 tentang bukan objek dengan memilih atau menghasilkan pendapatan yang bukan objek pajak misalnya perseroan terbatas (PT) dapat berinvestasi pada perusahaan atau badan usaha di Indonesia dan deviden yang diterima oleh PT akan dikategorikan sebagai pendapatan yang tidak termasuk objek pajak dengan syarat PT memiliki

saham paling sedikit 25% dari jumlah modal disektor pada perusahaan sebagaimana diatur pada UU PPh Pasal 4 ayat 3 (Luke & Zulaikha, 2016).

Keuntungan dari melakukantax *aggressive* adalah pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara dapat berkurang sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik atau pemegang saham dapat menikmati keuntungan perusahaan yang lebih besar atau penghematan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan bagi manajer untuk mendapatkan bonus atau *reward* atas keuntungan yang besar didapatkan oleh pemilik atau pemegang saham (Amril, Puspa, & Fauziati, 2015).

Sedangkan kerugian perusahaan dari melakukantax *aggressive* adalah penerimaan sanksi dari kantor pajak berupa denda atas tindakan agresivitas pajak dan turunnya nilai saham akibat investor mengetahui manajer melakukan tindakan agresivitas pajak dan pemerintah dapat menurunkan pendapatan negara pada sektor pajak (Kristianto & Ardy, 2015).

Tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Oleh karena itu, dalam memutuskan apakah akan melakukan agresivitas pajak atau tidak, manajemen harus mempertimbangkan berbagai keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi (Bunaidi, 2013).

Agresivitas pajak adalah tindakan memanipulasi atau merancang pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong *tax evasion* atau *tax avoidance* (Amril, Puspa, & Fauziati, 2015). Untuk mengukur agresivitas pajak, peneliti menggunakan metode *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresivan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan temporer maupun perbedaan tetap (Suyanto, 2012).

$$CashETR_{it} = \frac{CashTaxesPaid_{it}}{PretaxIncome_{it}}$$

$CashETR_{it}$ = Pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak.

3. *Related Party Transaction* (RPT)

Related party transaction adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan yang memiliki pihak hubungan istimewa, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak seperti perusahaan asosiasi, karyawan kunci, perusahaan dalam satu pengendali, perusahaan perorangan, perusahaan keluarga dekatnya atau perusahaan yang mempunyai hak suara signifikan (IAI, 2015).

Saat melakukan RPT ada hal atau sesuatu penting yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu karena pihak-pihak yang terlibat didalamnya merupakan pihak yang terafiliasi, maka kemungkinan akan berbeda dengan transaksi bisnis biasa dengan pihak luar. Transaksi yang dilakukan dengan pihak pemegang saham pengendali atau

manajemendapat menimbulkan insentif untuk ekspropriasi, yaitu menyaring keuntungan pribadi dari keuntungan perusahaan dengan menggunakan wewenang mereka yang digunakan untuk mempengaruhi kondisi transaksi agar sesuai dengan tujuan pribadinya dan sebaliknya akan menjadi biaya bagi pemegang saham minoritas atau pemegang saham lain(Farahmita, 2011). Peraturan OJK Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang harus dilaporkan pada publik. Peraturan ini memberikan pedoman bagi para emiten atas pengungkapan dan pelaporan transaksi yang memiliki sifat benturan kepentingan, termasuk pengungkapan dan pelaporan atas RPT untuk menghindari RPT yang cenderung merugikan pemegang saham minoritas(Utama, 2015).

RPT dapat dikatakan sebagai transaksi yang memiliki peran penting dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis (Gordon dan Henry, 2005) dalam (Simposium Nasional Akuntansi, 2018). Dalam melakukan ekspansi perusahaan biasanya mendapatkan dukungan berupa pendanaan dari transaksi internal perusahaan. Transaksi ini dilakukan biasanya karena adanya insentif dalam hal biaya modal yang lebih rendah.

Kontrak kerjasama antara agen atau manajer (yang diberikan wewenang) dengan *principal* atau investor (yang memberi wewenang) merupakan prinsip dasar dari teori keagenan adanya bukti hubungan kerja antar keduanya. Di antara *agent* dan *principal* masing-masing ingin mendapatkan kepentingannya sesuai dengan informasi yang dimiliki atau keuntungan yang sebesar-besarnya yang dituangkan dalam kontrak kerja

dan merupakan salah satu dari sekian banyak kontrak yang dimiliki perusahaan, dan hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan yang menyebabkan konflik kepentingan antara pemilik modal dan manajer. Berdasarkan kontrak kerja yang disebutkan di atas para pemegang saham dan investor mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan secara maksimal yang harus diupayakan oleh manajer, sementara di sisi lain manajer juga berkeinginan untuk mendapatkan kesejahteraannya yang sebesar-besarnya. Dengan demikian akan terdapat penyatuan kepentingan dari pihak-pihak tersebut dan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang disebut dengan masalah keagenan (Darma , 2019).

RPT di wilayah Asia sangatlah umum dimana banyak perusahaan besar yang terdaftar memiliki kelompok usaha. Selanjutnya, struktur kepemilikan di wilayah Asia termasuk Indonesia umumnya terkonsentrasi di tangan pendiri atau keluarga sebagai pemegang saham pengendalinya. Masalah keagenan yang timbul adalah masalah kekayaan pengambilalihan pemegang saham non pengendali oleh pemegang saham pengendali (Utama, 2015). Pengambil alihan kekayaan dengan cara mengendalikan pemilik dapat dilakukan melalui, antara lain adalah RPT. RPT dapat efisien ketika mereka menurunkan biaya transaksi. Jaminan bahwa RPT dipenuhi yaitu relatif tinggi dibandingkan dengan transaksi pihak ketiga. Selain itu, karena biaya transaksi RPT juga lebih rendah dari transaksi pihak ketiga (Gordon & Henry, 2016).

Dalam teori agensi dijelaskan bagaimana para manajer/agen dipacu untuk meningkatkan laba perusahaan dan mengatur agar dengan adanya beban pajak yang menyebabkan berkurangnya laba perusahaan tidak sampai berpengaruh terhadap kompensasi yang diterimanya sebagai penghargaan atas kinerjanya . Pengelolaan beban pajak seperti dimaksud yaitu dengan strategi penghindaran pajak dalam bentuknya berupa *Related Party Transaction* yang banyak dilakukan di Indonesia.

3.1 Pihak-pihak yang memiliki *related party* (hubungan berelasi) menurut PSAK no. 7

- Perusahaan yang memiliki satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries*).
- Perusahaan asosiasi (*associated company*).
- Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut. Mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor itu adalah yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat.
- Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk merencanakan, memimpin, dan

mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.

- Kepentingan substansial yang dimiliki perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Perusahaan yang mencakup memiliki anggota dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

3.2 Transaksi yang terjadi dalam RPT

Transaksi-transaksi yang karena sifatnya mungkin memberikan indikasi adanya pihak yang memiliki hubungan berelasi, seperti transaksi peminjaman yang tanpa beban bunga atau dengan suku bunga di atas atau di bawah yang berlaku umum, transaksi penjualan dengan harga yang berbeda yang berlaku umum, transaksi pertukaran aset, dan transaksi peminjaman tanpa ketentuan mengenai jadwal dan cara pembayaran.

3.3 Dampak Positif dan Negatif dari RPT

- Dampak Positif

Dampak positif dari *Related Party Transaction* dapat dilihat jika pemilik ataupun manajemen melakukan RPT yang bersifat efisien,

artinya pihak manajemen, pemilik dan investor tidak merasa dirugikan.

- Dampak Negatif

Di Indonesia RPT menjadi salah satu cara untuk memperoleh keuntungan pribadi baik pemilik maupun manajemen. *Related Party Transaction* yang merugikan yang merupakan cerminan dari teori agensi dapat dipandang konsisten dengan *conflict of interest hypothesis* (Gordon & Henry, 2016).

Pengukuran *Related Party Transaction* menurut Jian & Wong (2004) adalah:

$$RPT_{utang} = \frac{\text{Total Transaksi Utang Pihak Berelasi}}{\text{Total Liability yang dimiliki Perusahaan}}$$

4. Kepemilikan Terkonsentrasi

Teori agensi menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika *principal* mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* sehingga menyebabkan adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham dimana *agent* mengetahui lebih banyak informasi mengenai keadaan perusahaan sehingga menyebabkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan oportunistik untuk mengejar tujuan pribadi. Konflik keagenan tersebut dapat diminimalkan apabila pemegang saham pada suatu perusahaan terkonsentrasi pada satu atau beberapa pemegang saham saja. Hak suara yang lebih besar menandakan kelompok kepemilikan saham terkonsentrasi, semakin tinggi persentase kepemilikan saham

pengendali maka akan lebih besar pengaruh untuk menentukan kebijakan perusahaan (Timothy, 2010) dalam (Midiastuty, Suranta, & Ramdhan, 2017).

Menurut Chen et al (2010) dalam (Midiastuty, Suranta, & Ramdhan, 2017) Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi lebih peduli pada kemampuan perusahaan bertahan pada jangka panjang karena pemegang saham lebih mementingkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dibandingkan dengan nilai pemegang saham. Selain itu, perusahaan terkonsentrasi lebih peduli terhadap reputasi keluarga dan perusahaan. Kepedulian ini terkait dengan konsekuensi ekonomi jangka panjang yang akan dirasakan dari reputasi yang baik tersebut. Kepemilikan terkonsentrasi memiliki rentang waktu investasi yang lebih lama, kepemilikan yang lebih besar, serta memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap reputasi perusahaan.

Arifin (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh negara, keluarga, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan tanpa pengendali utama atau perusahaan publik.

Kepemilikan terkonsentrasi sebagai variabel independen diukur yaitu dengan persentase kepemilikan sahamnya $\geq 50\%$ dari seluruh total saham yang disetor penuh pada suatu perusahaan (OJK, 2014).

5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh perusahaan, lembaga, bank, dan lain sebagainya. Menurut (Sandy & Lukviarman, 2015) mendefinisikan kepemilikan saham institusional adalah persentase saham yang dimiliki individu dan kepemilikan institusi atau atas nama perorangan di atas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan *insider* atau manajerial. Dari definisi diatas, mengidentifikasikan bahwa kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar sehingga manajemen akan menghindari merugikan para pemegang saham.

Adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap manajemen yang lebih optimal (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh institusional akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik

manajer. Kepemilikan institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan penghindaran pajak.

Menurut Sartika (2012), kepemilikan institusional memiliki kelebihan sebagai berikut:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji kebenaran informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas segala aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional diukur dengan cara membandingkan saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang diterbitkan. Pengukuran ini seperti yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) dan Ngadiman dan Puspitasari (2014). Berikut pengukuran kepemilikan institusional:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

6. Komisaris Independen

Komisaris independen sebagai bagian dari *corporate governance* turut berperan dalam perencanaan pajak perusahaan. Perencanaan pajak akan bermanfaat bagi perusahaan apabila perusahaan mempunyai *corporate governance* yang baik. Komisaris independen didefinisikan

sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris atau direksi, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait (Winata, 2014).

Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris (Hanum, 2013). Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Nomor IX.I5 adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
3. Komisaris independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Komisaris independen harus menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah (Okrayanti, Utomo, & Nuraina, 2017). Semakin besarnya persentase dewan komisaris independen dalam struktur dewan komisaris maka semakin tinggi juga penghindaran pajak yang ditimbulkan (Wibawa & Abdillah, 2016).

Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan persentase jumlah komisaris independen dengan jumlah seluruh dewan komisaris perusahaan pada sampel tahun yang diamati. Pengukuran ini seperti yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015), dan Kurniasih dan Sari (2013). Berikut pengukuran proporsi dewan komisaris independen:

Proporsi dewan komisaris independen

$$= \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$$

7. Komite Audit

Komite audit telah menjadi bagian dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). Zarkasyi (2008) menyatakan bahwa komite audit didefinisikan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Komite audit merupakan suatu komite

yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dengan demikian, tugasnya adalah memperkuat dan membantu fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, manajemen risiko, dan implementasi dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2009).

Suatu perusahaan dapat meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan berjalannya komite audit yang efektif (Saputra & Asyik, 2017). Sementara BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang. Jadi, jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI. Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan meminimalkan laba untuk kepentingan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sandy & Lukviarman, 2015).

Komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen (Zarkasyi, 2008). Sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang komite audit harus independen dan bekerja secara profesional. Karena komite audit dibentuk untuk memperkuat dan membantu fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku merupakan tanggung jawab komite audit di bidang tata kelola

perusahaan. Oleh sebab itu dengan adanya komite audit semakin kecil kemungkinan perusahaan mempunyai kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak.

Komite audit diukur dengan cara jumlah komite audit pada suatu perusahaan. Pengukuran ini seperti yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015). Berikut pengukuran komite audit:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota komite audit pada suatu perusahaan}$$

B. Studi Penelitian Terdahulu

Studi penelitian mengenai Tax Aggressive telah banyak dilakukan, tetapi hasilnya masih belum konsisten. Berikut adalah uraian dari penelitian terdahulu mengenai Tax Aggressive :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pranata P. Widiastuty Eddy Suranta, Putri Maretha Ramdhan, 2017	Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Pajak	<p>Variabel Independen : Kepemilikan Terkonsentrasi dan <i>Corporate Governance</i></p> <p>Variabel dependen : Agresivitas Pajak</p>	Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak diterima melalui proksi <i>effective tax rate</i> (ETR)

2.	Nyoman Yudha Astriayu Widyari dan Ni Ketut Rasmini, 2019	Pengaruh Kualitas audit, <i>Size, Leverage</i> , dan Kepemilikan Keluarga pada agresivitas pajak.	<p>Variabel Independen : Kualitas Audit, <i>Size, Leverage</i>, dan Kepemilikan Keluarga</p> <p>Variabel dependen : Agresivitas Pajak</p>	Pengukuran yang dilakukan dengan <i>cash effective tax rate</i> (CETR) memperoleh hasil bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif pada agresivitas pajak. Sejalan dengan teori akuntansi positif yang menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan menggunakan metode akuntansi yang paling sesuai untuk mengambil tindakan dalam pelaporan keuangan
3.	Sapta Setia Darma, 2019	Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap strategi penghindaran pajak	<p>Variabel independen: <i>Related Party Transaction</i> dan <i>Thin Capitalization</i></p> <p>Variabel dependen: strategi penghindaran</p>	Berdasarkan hasil olah data maka dapat diperoleh data bahwa Variabel <i>Related Party Transaction- Receivable</i> (RPT_REC) tidak berpengaruh terhadap Strategi Penghindaran Pajak terbukti

			pajak	<p>nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel yaitu $1,078 < 1,98010$. Selanjutnya nilai sig $0,283 \geq 0,05$, maka <i>related party transaction-receivable</i> tidak berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak atau H1 ditolak dan ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Djari (2016) mengungkapkan bahwa perusahaan yang mempunyai piutang dengan pihakberelasi sengaja mengadakan perjanjian dengan pihak terkait hingga tidak terdapat lagi piutang dengan pihak berelasi.</p>
4.	Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra,	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran	Variabel Independen : Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan <i>Good Corporate Governance</i>	Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik kepemilikan keluarga tidak berpengaruh

	2016	Pajak	Variabel dependen : Penghindaran Pajak	signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hal ini bisa disebabkan karena di Indonesia menganut sistem <i>self assessment</i> dimana wajib pajak yang menghitung, melaporkan dan membayar pajak mereka sehingga dapat dengan mudah mereka melakukan tindakan <i>tax avoidance</i> .
5.	Dianing Ratna Wijayani, 2016	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, <i>Corporate Governance</i> , dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia	Variabel Independen : Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, <i>Corporate Governance</i> , dan Kepemilikan Institusional Variabel dependen:	Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), hasil ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 0,001 dan nilai signifikansi 0,961 > 0,05. Dengan demikian dapat

			Penghindaran Pajak	disimpulkan bahwa H2 ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) di tolak.
6.	Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, 2016	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak	<p>Variabel Independen : Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>Variabel dependen : Penghindaran Pajak</p>	Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik proporsi dewan komisaris independen yang merupakan proksi dari <i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran

				pajak.
7.	Azizah dan Kusmuriyan to 2016	<i>The Effect of Related Party Transaction, Leverage, Commissioners and Directors Compensation on Tax Aggressiveness</i>	<p>Independen: <i>The Effect of Related Party Transaction, Leverage, Commissioners and Directors Compensation</i></p> <p>Dependen: <i>Tax Aggressiveness</i></p>	<i>Related Party Transaction</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
8.	Tiara dan Wijaya 2015	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak	<p>Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i>, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan.</p> <p>Dependen: Agresivitas Pajak.</p>	<p>Manajemen Laba dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>Proporsi komisaris independen, Likuiditas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak.</p>
9.	Sandy & Lukviarman 2015	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris pada Perusahaan	<p>Independen: <i>Corporate Governance</i></p> <p>Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

		Manufaktur.		
10.	Diantari & Ulupui 2016	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen: Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak CETR.

Sumber: Hasil Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pemikiran

1. *Related Party Transaction*

Azizah dan Kusmuriyanto (2016) menyatakan bahwa *Related Party Transaction* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian Sapta Setia Darma (2019) menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil olah data maka dapat diperoleh data bahwa *Variable Related Party Transaction-Receiveable* (RPT_REC) tidak berpengaruh terhadap Strategi Penghindaran Pajak terbukti nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel yaitu $1,078 < 1,98010$. Selanjutnya nilai sig $0,283 \geq 0,05$, maka *related party transaction-receivable* tidak berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak atau H1 ditolak dan hal yang sama juga dikemukakan oleh Djari (2016) yakni perusahaan yang mempunyai piutang dengan pihak berelasi

sengaja mengadakan perjanjian dengan pihak terkait hingga tidak terdapat lagi piutang dengan pihak berelasi.

2. Kepemilikan Terkonsentrasi

Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2016) menyatakan bahwa hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hal ini bisa disebabkan karena di Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak yang menghitung, melaporkan dan membayar pajak mereka sehingga dapat dengan mudah mereka melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian Pranata P. Widiastuty Eddy Suranta, Putri Maretha Ramdhan (2017) menjelaskan bahwa Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak diterima melalui proksi *effective tax rate* (ETR) dan hal yang sama juga dikemukakan oleh Nyoman Yudha Astriayu Widyari dan Ni Ketut Rasmini (2019) yakni Pengukuran yang dilakukan dengan *cash effective tax rate* (CETR) memperoleh hasil bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif pada agresivitas pajak. Sejalan dengan teori akuntansi positif yang menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan menggunakan metode akuntansi yang paling sesuai untuk mengambil tindakan dalam pelaporan keuangan.

3. Kepemilikan Institusional

Sandy dan Lukviarman (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak tidak ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Penelitian Amril, Dwi Fitri Puspa, dan Popi Fauziati (2015) menjelaskan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan hal yang sama dikemukakan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

4. Komisaris Independen

Sandy dan Lukviarman (2015) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, apabila semakin

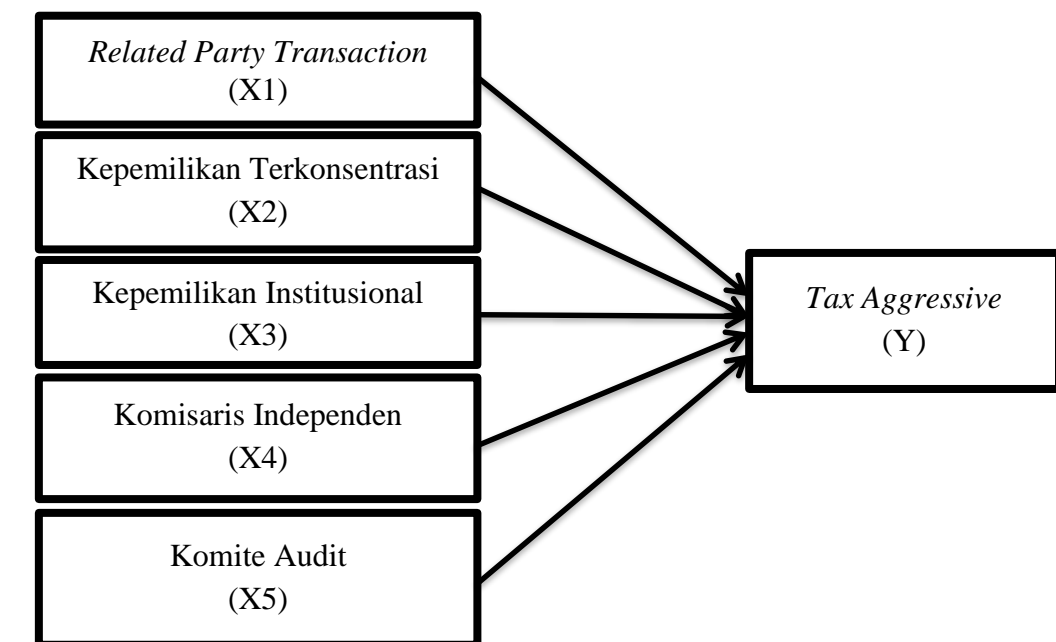
besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin tinggi dalam pengawasan terhadap manajemen dan berakibat semakin rendah penghindaran pajak. Namun sebaliknya, apabila semakin kecil proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin tinggi penghindaran pajak. Penelitian Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2016) menjelaskan bahwa hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik proporsi dewan komisaris independen yang merupakan proksi dari *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak dan hal yang sama juga dikemukakan oleh Amril, Dwi Fitri Puspa, dan Popi Fauziati (2015) memberikan hasil bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

5. Komite Audit

Sandy dan Lukviarman (2015) tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya penghindaran pajak ditentukan oleh komite audit.

Dengan kata lain, apabila semakin banyak jumlah anggota komite audit maka akan semakin rendah penghindaran pajak. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah anggota komite audit maka akan semakin tinggi penghindaran pajak. Penelitian Singly dan Sukartha (2015) dan Kurniasih dan Sari (2013) memberikan hasil yang berbeda bahwa komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini berarti jumlah sedikit atau banyak komite audit pada suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi terhadap perilaku penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka menghasilkan hipotesis yang disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga RPT sebagai hipotesis pertama (H1) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Diduga Kepemilikan Terkonsentrasi (H2) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Diduga Kepemilikan Institusional (H3) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Diduga Komisaris Independen (H4) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5. Diduga Komite Audit (H5) berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Pengumpulan data laporan tahunan (*Annual Report*) pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif & komponen periode 2016-2019 diperoleh dari website PT. Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website resmi masing-masing perusahaan. Selain itu, data ini juga dilengkapi oleh beberapa sumber data lainnya berupa jurnal, skripsi, internet atau buku.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seperangkat unit yang menjadi perhatian peneliti (Butar Butar, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur subsektor otomotif & komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 sebanyak 12 perusahaan.

2. Sampel

Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjek peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini didasarkan pada kriteria tertentu yaitu perusahaan manufaktur subsektor otomotif & komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2019. Adapun kriteria seleksi sampel yang digunakan dalam model penelitian yaitu:

- a) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan lengkap dimana dapat diperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b) Perusahaan tidak mengalami kerugian sebelum pajak karena dasar pengenaan pajak penghasilan adalah *Income Before tax*.
- c) Laporan keuangan perusahaan yang memiliki data informasi keuangan yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel.

Dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016-2019 setelah dilakukan identifikasi dan pemilihan sampel berdasarkan karakteristik yang telah dikemukakan di atas terdapat perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Data mengenai pengambilan sampel dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah Sampel
Jumlah sampel berdasarkan kriteria	12
Tahun Pengamatan	4
Jumlah Pengamatan	48

Sumber: data diolah

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diatas, diperoleh sebanyak perusahaan sebagai sampel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Tahun 2016-2019

No.	Kode	Nama Perusahaan
1.	ASII	Astra Internasional Tbk
2.	AUTO	Astra Otoparts Tbk
3.	BOLT	Garuda Metalindo Tbk
4.	BRAM	Indo Kordsa Tbk
5.	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk
6.	GJTL	Gajah Tunggal Tbk
7.	IMAS	Indomobil Sukses Internasional
8.	INDS	Indospring Tbk
9.	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
10.	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk
11.	PRAS	Prima alloy steel Universal Tbk
12.	SMSM	Selamat Sempurna Tbk

Sumber: www.idx.co.id

C. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

a. *Tax Aggressive* (Y)

Tindakan perusahaan yang dilakukan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) yang disebut dengan agresivitas pajak perusahaan. Agresivitas pajak adalah tindakan memanipulasi atau merancang pendapatan kena pajak melalui

perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong ilegal (*tax evasion*) (Amril, Puspa, & Fauziati, 2015).

b. *Related Party Transaction* (X1)

Related Party Transaction (RPT) adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak seperti perusahaan asosiasi, karyawan kunci, perusahaan dalam satu pengendali, perusahaan keluarga dekatnya, perusahaan perseorangan atau perusahaan yang mempunyai hak suara signifikan (Farahmita, 2011).

c. Kepemilikan Terkonsentrasi (X2)

Kepemilikan Terkonsentrasi adalah perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara atau institusi keuangan. Perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan oleh warisan atau ketturunan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankan perusahaan tersebut atau keluarga yang secara terang-terangan mewariskan kepemilikan perusahaan kepada generasi berikutnya (Morck & Bernard, 2004).

d. Kepemilikan Institusional (X3)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, bank, atau investor luar negeri kecuali kepemilikan individual (Damayanti & Susanto, 2015).

e. Komisaris Independen (X4)

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, dan tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait (Winata, 2014).

f. Komite Audit (X5)

Komite Audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Berjalannya komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalkan kecurangan dalam laporan keuangan dan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen (Saputra & Asyik, 2017).

2. Definisi Operasional

Tabel 3.3
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran
<i>Tax Aggressive</i> (Y) (Amril, Puspa, & Fauziati, 2015)	Tindakan perusahaan yang dilakukan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (<i>tax avoidance</i>) maupun ilegal (<i>tax evasion</i>) yang disebut dengan agresivitas pajak perusahaan.	<i>Case Taxes Paid</i> Dibagi Dengan <i>Pre Tax Income</i>	Rasio
<i>Related Party Transaction</i> (Farahmita, 2011)	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu transaksi yang dilakukan	Total Transaksi Utang Pihak Berelasi Dibagi Dengan Total Liability Yang	Rasio

	dengan pihak-pihak seperti perusahaan asosiasi, karyawan kunci, perusahaan dalam satu pengendali, perusahaan perseorangan, perusahaan keluarga dekatnya atau perusahaan yang mempunyai hak suara signifikan.	Dimiliki Perusahaan	
Kepemilikan Terkonsentrasi (Morck & Bernard, 2004)	Perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan oleh keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankan perusahaan tersebut atau keluarga yang secara terang-terangan mewariskan kepemilikan perusahaan kepada generasi berikutnya.	Persentase Kepemilikan Saham $\geq 50\%$ dari Seluruh Total Saham Yang Disetor Penuh Pada Suatu Perusahaan	Rasio
Kepemilikan Institusional (Damayanti & Susanto, 2015)	Kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank kecuali kepemilikan individual.	Saham Yang Dimiliki Institusi Dibagi Dengan Jumlah Saham Yang Diterbitkan	Rasio
Komisaris Independen (Winata, 2014)	Seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait.	Jumlah Dewan Komisaris Dibagi Dengan Seluruh Dewan Komisaris. Hasilnya Dikali 100%	Rasio
Komite Audit (Saputra & Asyik, 2017)	Suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat	Komite Audit = \sum Anggota Komite Audit Pada Suatu Perusahaan	Rasio

	secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan.		
--	---	--	--

Sumber: Operasionalisasi Variabel

D. Metode Pengumpulan Data

Setelah melalui rangkaian kegiatan seperti dijelaskan diatas, maka langkah berikutnya menentukan teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan sifat dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dokumen dengan melakukan analisis terhadap data sekunder laporan keuangan yang dimuat di *IDX Statistic* periode 2016-2019 melalui website www.idx.co.id, selain itu melakukan analisis jurnal, analisis buku dan analisis catatan historis sebagai pokok kajian (*library research*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa data laporan tahunan (*Annual Report*) perusahaan manufaktur subsektor otomotif & komponen periode 2016– 2019 yang terdaftar di BEI.

Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini adalah menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 22.0.

E. Metode Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan akan diolah, kemudian akan dianalisis untuk memperoleh jawaban dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan program SPSS versi 22.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018).

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang memenuhi asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi merupakan suatu model regresi yang baik.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun variabel dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak normal. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan adalah jika $2\text{-tailed} > 0,05$, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas atau sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas

Adanya kemiripan yang bisa menimbulkan korelasi antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya dalam satu model regresi, dan jika terjadi maka harus dibuang salah satu variabel independennya. Namun untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas harus dilakukan dengan

caramenganalisis matrik korelasi antara variabel bebas dan menghitung nilai Tolerance, *variance inflation factor* (VIF) yang bila $VIF < 10$ atau nilai tolerance $> 0,10$ berarti tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2018).

c. Uji Autokorelasi

Suatu model regresi yang baik adalah tidak mengalami masalah autokorelasi, masalah ini terjadi karena antar satu pengamatan/periode satu sama lain terjadi korelasi yang biasanya terjadi pada data yang berurut (*time series*). Dan untuk mengatasinya dilakukan dengan cara uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan jika nilai DW berada diantara -2 dan +2, tidak terjadi (Sunyoto, 2007).

d. Uji Heteroskedastisitas

Terjadinya kondisi variasi dari satu residual suatu pengamatan yang satu sama lain bersifat tetap merupakan indikasi bahwa model regresi yang baik dalam arti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas (terjadi perbedaan variasi residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya). Dan untuk memastikan tidak terjadi perbedaan variasi tersebut dilihat pada grafik *scatterplot* yang apabila dalam grafik tersebut menunjukkan pola yang tidak beraturan dan penyebaran titik-titik terjadi diatas dan dibawah angka 0 (sumbu Y) maka dikatakan tidak terjadi perbedaan variasi atau heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018) adalah analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui atau rata-rata populasi. Hasil analisis regresi yaitu berupa koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada.

Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = *Tax Aggressive*

A = Konstanta

$B_1; b_2; b_3; b_4; b_5$ = Koefisien Regresi pada variabel

X_1 = *Related Party Transaction*

X_2 = Kepemilikan Terkonsentrasi

X_3 = Kepemilikan Institusional

X_4 = Komisaris Independen

X_5 = Komite Audit

ϵ = Variabel Pengganggu / Residual

Pengujian terhadap hipotesis yang digunakan penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Pengujian Kelayakan Model (Uji F)

Suatu fungsi regresi yang baik yaitu diukur dari ketepatan dalam menaksir nilai aktual yang diukur salah satunya dengan nilai statistik F yang diperoleh melalui uji statistik F, yaitu untuk mendeteksi apakah variabel bebas semuanya bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terkait dengan tingkat signifikansi yang dipakai 0,05 dan ketentuannya adalah untuk nilai signifikan = 0,05 atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dinyatakan terjadi pengaruh secara simultan.

b) Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik t)

Suatu fungsi regresi yang baik adalah diukur dari ketepatan untuk memperkirakan nilai aktual yang ditentukan melalui nilai statistik t dengan uji t (parsial) karena uji ini bertujuan mengukur tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial melalui perbandingan nilai t tabel dan t hitung dan juga harus diperhatikan apakah sig t lebih besar atau lebih kecil dari sig 0,05.

c) Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Suatu fungsi regresi yang baik yaitu diukur dari ketepatan dalam menaksir nilai aktual yang diukur salah satunya dengan nilai koefisien determinasi (R^2) yang berkisar antara nol dan satu.

Sehingga bila nilai R^2 mendekati satu berarti variabel independen mampu menyediakan hampir semua informasi untuk memprediksi variasi variabel terikat yang dibutuhkan. Namun sifat dari R^2 ini adalah bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukan ke dalam model regresi karena ketika satu variabel bebas bertambah maka R^2 pun bertambah tanpa memperhitungkan variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat, untuk mengatasi kondisi ini peneliti dianjurkan untuk memakai nilai Adjusted R^2 yang bersifat lebih fleksibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Bursa Efek Indonesia

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal Indonesia telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal sempat mengalami kevakuman.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi dari bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange (IDX) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi,

pemerintah memutuskan untuk menggabung BEJ sebagai pasar saham dan BES sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau pasar modal merupakan tempat diperdagangkannya instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Instrumen-instrumen tersebut diperdagangkan dengan sistem bernama Jakarta Automated Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX. Untuk mengetahui harga saham perusahaan yang masuk di Bursa Efek Indonesia dapat melihat pada Indeks Harga Saham. Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki 12 indeks harga saham, yang secara terus-menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik. Indeks-indeks tersebut adalah indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Sektoral, Indeks LQ45, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index(JII), Indeks Kompas 100, Indeks Bisnis-27, Indeks PEFINDO25, Indeks SRI-KEHATI, Indeks Papan Utama, Indeks Papan Pengembangan, dan Indeks Individual.

Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

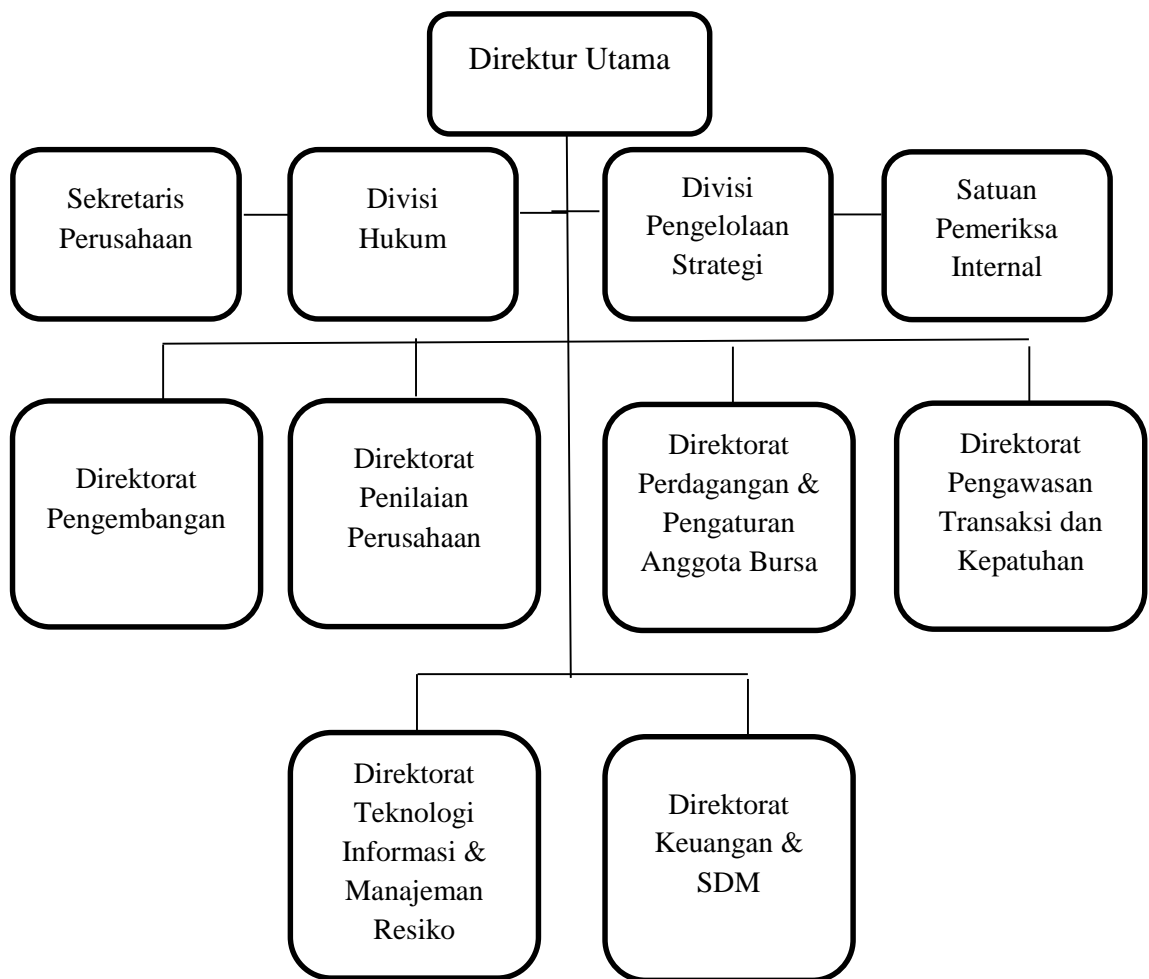
3. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia

Visi : Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

Misi : Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

4. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia

Struktur organisasi merupakan perangkat perusahaan khususnya manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi pada Bursa Efek Indonesia saat ini telah ditinjau dan penyusunannya telah diselaraskan kepada visi dan misi yang akan dicapai dengan melihat proses bisnis dan kemampuan karyawan guna mencapai performa yang optimal. Berikut ini bagan struktur organisasi Bursa Efek Indonesia :



Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi

Sedangkan susunan pengurus Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama : John Aristianto Prasetyo
- 2) Komisaris : Garibaldi Thohir
- 3) Komisaris : Hendra H. Kustarjo
- 4) Komisaris : Lydia Trivelly Azhar

b. Dewan Direksi

- 1) Direktur Utama : Inarno Djajadi
- 2) Direktur Penilaian Perusahaan : I Gede Nyoman Yetna
- 3) Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa : Laksono W. Widodo
- 4) Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan : Kristian S. Manullang
- 5) Direktur Teknologi Informasi & Manajemen Risiko : Fithri Hadi
- 6) Direktur Pengembangan : Hasan Fawzi
- 7) Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Risa S. Rustam.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Menurut Ghozali (2016) data statistik deskriptif ini bertujuan untuk menampilkan informasi-informasi yang relevan yang terkandung dalam data tersebut.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian seperti *Tax Aggressive* (Y), *Related Party Transaction* (X₁), Kepemilikan Terkonsentrasi (X₂), Kepemilikan Institusional (X₃), Komisaris Independen (X₄) dan Komite Audit (X₅) Hasil pengujian statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Data-data Penelitian
Periode Tahun 2016-2019

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Related Party Transaction	48	,0023455	1,5903365	,165239578	,2948701116
Kepemilikan Terkonsentrasi	48	,5000000	,9964000	,671952083	,1476120115
Kepemilikan Institusional	48	,1660987	3,9765327	1,627774767	,5454924390
Komisaris Independen	48	,2200000	,6700000	,358958333	,0678935206
Komite Audit	48	3,0000000	5,0000000	3,895833333	,8052905735
Tax Aggressive	48	-1,7890481	-,2247494	-,688710917	,3350927795
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Output Program SPSS 22.

Berdasarkan tabel 4.1 diatas di dapatkan bahwa :

- 1) *Tax Aggressive* menunjukan bahwa rata-rata *Tax Aggressive* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tahun 2016-2019 sebesar Rp -0,688710917; nilai terendah Rp -1,7890481; nilai tertinggi Rp -0,2247494 dengan standard deviation Rp 0,3350927795.
- 2) Nilai *Related Party Transaction* menunjukan bahwa rata-rata nilai *Related Party Transaction* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tahun 2016-2019 sebesar Rp 0,165239578; nilai terendah Rp 0,0023455; nilai tertinggi Rp 1,5903365 dengan standart deviation Rp 0,2948701116.
- 3) Kepemilikan Terkonsentrasi menunjukan bahwa rata-rata Kepemilikan Terkonsentrasi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tahun 2016-2019 sebesar 67,1952083%; nilai

terendah 50,00000%; nilai tertinggi 99,64000% dengan standard deviation 14,76120115%.

- 4) Nilai Kepemilikan Institusional menunjukkan bahwa rata-rata Kepemilikan Institusional pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tahun 2016-2019 sebesar 1,627774767; nilai terendah 0,1660987; nilai tertinggi 3,9765327 dengan standard deviation 0,5454924390.
- 5) Komisaris Independen menunjukkan bahwa rata-rata Komisaris Independen pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tahun 2016-2019 sebesar 0,358958333%; nilai terendah 0,2200000%; nilai tertinggi 0,6700000% dengan standard deviation 0,0678935206%.
- 6) Komite Audit menunjukkan bahwa rata-rata Komite Audit pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tahun 2016-2019 sebesar 3,89583333; nilai terendah 3,0000000; nilai tertinggi 5,0000000 dengan standard deviation 0,8052905735.

2. Uji. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji data variabel bebas dan data variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan adalah jika 2-

tailed>0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas atau sebaliknya.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,29258866
Most Extreme	Absolute		,152
Differences	Positive		,066
	Negative		-,152
Test Statistic			,152
Asymp. Sig. (2-tailed)			,007 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,199 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,189
		Upper Bound	,210

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

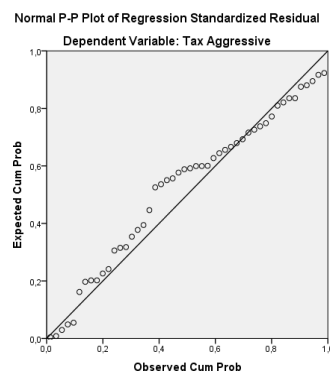
c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1502173562.

Sumber: Output Program SPSS 22

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas dengan One Sample Kolmogorov Smirnov Test



Sumber: Output Program SPSS 22

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas dengan Normal Probability Plots

Dari tabel one sample kolmogorv smirnov test maupun grafik normal *probability plots* dapat disimpulkan bahwa tabel one sample kolmogorv smirnov test terdistribusi normal dengan bukti nilai Monte Carlo Sig. 2-tailed 0,199 > 0,005. Sedangkan pada grafik normal *probability* menunjukkan bahwa plotting data tidak jauh dari garis diagonalnya dan menempel pada garis diagonal. Hal ini berarti bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) dalam model regresi. Persamaan regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel bebas. Variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* maupun VIF (*Value Inflation Factor*). Model regresi yang bebas dari multikolinearitas memiliki nilai $VIF < 10$ dan memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0.1 (Sunyoto, 2013).

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,099	,403			
Related Party Transaction Kepemilikan Terkonsentrasi	-,300	,170	-,264	,807	1,239
	-,406	,344	-,179	,790	1,265

Kepemilikan Institusional	,154	,098	,250	,720	1,388
Komisaris Independen	-,074	,732	-,015	,826	1,211
Komite Audit	-,126	,061	-,303	,853	1,173

a. Dependent Variable: Tax Aggressive

Sumber: Output Program SPSS 22

Dari tabel 4.2 diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

c. Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi yaitu dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan terjadi autokorelasi positif jika nilai $DW < -2$, tidak terjadi autokorelasi jika $-2 < DW < +2$, terjadi autokorelasi negatif jika $DW > +2$. Perlu diketahui bahwa data yang baik adalah data yang tidak terjadi autokorelasi (Sunyoto, 2013).

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,487 ^a	,238	,147	,3095150514	1,317

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Terkonsentrasi, Related Party Transaction, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

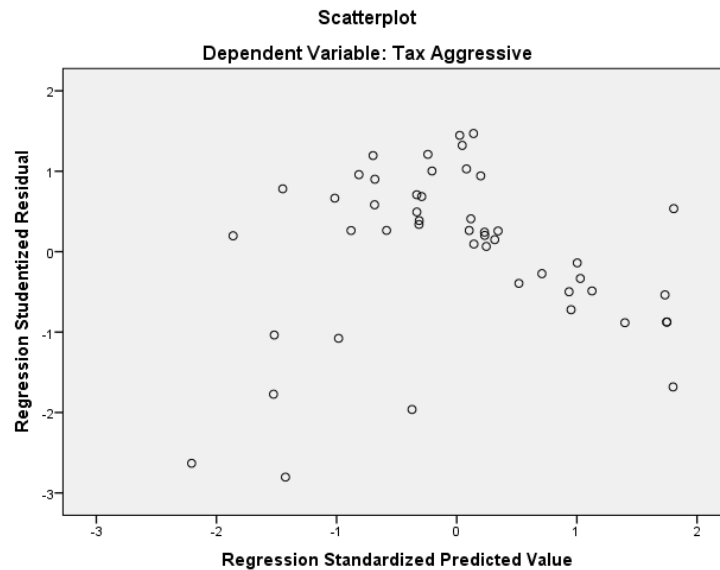
b. Dependent Variable: Tax Aggressive

Sumber: Output Program SPSS 22

Dari hasil olah data menggunakan SPSS menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1.317, nilai tersebut lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari +2 atau $-2 < 1.317 < +2$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji mengenai sama atau tidaknya varian dari residual dari observasi yang satu ke observasi yang lain. Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi jika pada titik *scatterplot* titik-titik hasil data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun diatas titik orogin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang (Sunyoto, 2013).



Sumber: Output Program SPSS 22

Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel yang melibatkan lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen (Sunyoto, 2013).

Tabel 4.5
Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,099	,403		-,245	,808		
Related Party Transaction	-,300	,170	-,264	-1,760	,086	,807	1,239
Kepemilikan Terkonsentrasi	-,406	,344	-,179	-1,180	,245	,790	1,265
Kepemilikan Institusional	,154	,098	,250	1,575	,123	,720	1,388
Komisaris Independen	-,074	,732	-,015	-,101	,920	,826	1,211
Komite Audit	-,126	,061	-,303	-2,077	,044	,853	1,173

a. Dependent Variable: Tax Aggressive
Sumber: Output Program SPSS 22

Dari hasil analisis dengan program SPSS versi 22 tersebut, maka dapat diketahui persamaan regresi dari penelitian ini. Adapun persamaan regresi linier yang terbentuk adalah:

$$Y = -0,99 Y - 0,300 X_1 - 0,406 X_2 + 0,154 X_3 - 0,074 X_4 - 0,126 X_5$$

Dari persamaan regresi diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar -0,099 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen yang meliputi *Related Party Transaction*, *Kepemilikan Terkonsentrasi*, *Kepemilikan Institusional*, *Komisaris Independen*, dan *Komite Audit* sama dengan -0 maka tingkat Agresivitas Pajak sebesar -0,099.
- b. Nilai koefisien b1 sebesar -0,300 artinya variabel *Related Party Transaction* memiliki nilai koefisien yang bertanda negatif. Hal ini

menunjukkan bahwa setiap peningkatan *Related Party Transaction* sebesar nol koma maka akan menyebabkan penurunan *Tax Aggressive* sebesar -0,300 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

- c. Nilai koefisien b_2 sebesar -0,406 artinya variabel Kepemilikan Terkonsentrasi memiliki nilai koefisien yang bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Kepemilikan Terkonsentrasi sebesar nol koma maka akan menyebabkan penurunan *Tax Aggressive* sebesar -0,406 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
- d. Nilai koefisien b_3 sebesar 0,154 artinya variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai koefisien yang bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Kepemilikan Institusional sebesar nol koma maka akan menyebabkan peningkatan *Tax Aggressive* sebesar 0,154 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
- e. Nilai koefisien b_4 sebesar -0,74 artinya variabel Komisaris Independen memiliki nilai koefisien yang bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Komisaris Independen sebesar nol koma maka akan menyebabkan penurunan *Tax Aggressive* sebesar -0,74 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
- f. Nilai koefisien b_5 sebesar -0,126 artinya variabel Komite Audit memiliki nilai koefisien yang bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Komite Audit sebesar nol koma maka akan menyebabkan penurunan *Tax Aggressive* sebesar 0,126 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

4. Uji Hipotesis

a. Pengujian Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak dengan variabel dependen. Berikut hasil Uji F dengan menggunakan pengujian statistik SPSS.

Tabel 4.6
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,254	5	,251	2,618	,038 ^b
	Residual	4,024	42	,096		
	Total	5,277	47			

a. Dependent Variable: Tax Aggressive

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Terkonsentrasi, Related Party Transaction, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

Sumber: Output Program SPSS 22

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah bisa diterima. hal ini dapat dibuktikan dengan :

1. Berdasarkan Tabel output SPSS diatas, diketahui nilai sig. Sebesar 0,038. Karena nilai sig. $0,038 < 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam Uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain variabel X berpengaruh terhadap Y.
2. Berdasarkan perbandingan Nilai F Hitung dengan H Tabel. Berdasarkan nilai-nilai output diatas Nilai F Hitung sebesar 2,618 > Nilai F Tabel 2,41 maka variabel X berpengaruh terhadap Y.

b. Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik t)

Hasil pengujian tersebut dapat menentukan hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Untuk mendeteksi hasil pengujian ditentukan kriteria sebagai berikut :

- Nilai Sig < 0,05 = berpengaruh signifikan
- Nilai Sig > 0,05 = tidak berpengaruh

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,099	,403		-,245	,808
Related Party Transaction	-,300	,170	-,264	-1,760	,086
Kepemilikan Terkonsentrasi	-,406	,344	-,179	-1,180	,245
Kepemilikan Institusional	,154	,098	,250	1,575	,123
Komisaris Independen	-,074	,732	-,015	-,101	,920
Komite Audit	-,126	,061	-,303	-2,077	,044

a. Dependent Variable: Tax Aggressive

Sumber: Output Program SPSS 22

Dari Tabel diatas, maka hasil regresi berganda dapat menganalisis pengaruh masing-masing variabel *Related Party Transaction*, Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap *Tax Aggressive* dari tingkat signifikan. Hasil Pengujian masing-masing variabel independen dengan uji t terhadap variabel dependen dapat dianalisis sebagai berikut:

1) Uji Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji untuk variabel *Related Party Transaction*, diperoleh nilai $t_{hitung} = -1,760$ sedangkan t_{tabel} ($\alpha = 0,05\%/2$, ($n=48$), ($k=5$), $dk = 48-5-1=42$) adalah 2,018, $t_{hitung} -1,760 < t_{tabel} 2,018$ dengan angka signifikansi $0,086 > \alpha = 0,05$. Berdasarkan kriteria diatas dapat diketahui bahwa pada taraf signifikansi 0,05 variabel *Related Party Transaction* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Tax Aggressive*.

2) Uji Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji untuk variabel Kepemilikan Terkonsentrasi, diperoleh nilai $t_{hitung} = -1,180$ sedangkan t_{tabel} ($\alpha = 0,05\%/2$, ($n=48$), ($k=5$), $dk = 48-5-1=42$) adalah 2,018, $t_{hitung} -1,180 < t_{tabel} 2,018$ dengan angka signifikansi $0,245 > \alpha = 0,05$. Berdasarkan kriteria di atas dapat diketahui bahwa pada taraf signifikansi 0,05 variabel Kepemilikan Terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Tax Aggressive*.

3) Uji Hipotesis Ketiga (H3)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji untuk variabel Kepemilikan Institusional, diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,575$ sedangkan t_{tabel} ($\alpha = 0,05\%/2$, ($n=48$), ($k=5$), $dk = 48-5-1=42$) adalah 2,018 $t_{hitung} 1,575 < t_{tabel} 2,018$ dengan angka signifikansi $0,123 > \alpha = 0,05$. Berdasarkan kriteria diatas dapat diketahui bahwa pada taraf signifikansi 0,05 variabel

Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Tax Aggressive*.

4) Uji Hipotesis Keempat (H4)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji untuk variabel Komisaris Independen, diperoleh nilai $t_{hitung} = -0,101$ sedangkan t_{tabel} ($\alpha=0,05\%/2$, ($n=48$), ($k=5$), $dk= 48-5-1=42$) adalah 2,018 $t_{hitung} -0,101 < t_{tabel} 2,018$ dengan angka signifikansi $0,920 > \alpha= 0,05$. Berdasarkan kriteria diatas dapat diketahui bahwa pada taraf signifikansi 0,05 variabel Komiaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Tax Aggressive*.

5. Uji Hipotesis Kelima (H5)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji untuk variabel Komite Audit, diperoleh $t_{hitung} = -2,077$ sedangkan t_{tabel} ($\alpha=0,05\%/2$, ($n=48$), ($k=5$), $dk= 48-5-1=42$) adalah 2,018 $t_{hitung} -2,077 < t_{tabel} 2,018$ dengan angka signifikansi $0,044 < \alpha= 0,05$. Berdasarkan kriteria diatas dapat diketahui bahwa pada taraf signifikansi 0,05 variabel Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap variabel *Tax Aggressive*.

c. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1, nilai yang semakin mendekati 1 berarti variabel independen mampu memberikan semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan begitu juga sebaliknya.

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,487 ^a	,238	,147	,3095150514	1,317

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Terkonsentrasi, Related Party Transaction, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Tax Aggressive

Sumber: Output Program SPSS 22

Dari tabel 4.7 di atas, angka koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,147 hal ini berarti bahwa variabel *Related Party Transaction*, Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh terhadap variabel *Tax Aggressive* sebesar 14,7%, sedangkan sisanya ($100\% - 14,7\% = 85,3\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti yang mempengaruhi *Tax Aggressive*.

C. Pembahasan

Berdasarkan pembahasan analisis yang dilakukan, maka berikut ini adalah hasil pembahasan pada penelitian ini:

1. Pengaruh *Related Party Transaction* terhadap *Tax Aggressive*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan variabel *Related Party Transaction* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressive* di Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen. Hal ini ditunjukkan dengan angka signifikansi $0,086 > \alpha = 0,05$. Sedangkan $t_{hitung} -$

$1,760 < t_{\text{tabel}} 2,018$, sehingga hipotesis pertama yang diajukan *Related Party Transaction* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tidak mempunyai pengaruh terhadap *Tax Aggressive*.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Related Party Transaction* merupakan transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa mengakibatkan adanya hutang hubungan istimewa. Hutang hubungan istimewa timbul karena adanya transaksi penyerahan barang atau jasa.. Transaksi hutang tersebut membuat hutang tidak wajar yang timbul karena adanya kesepakatan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang dimaksud hutang tidak wajar disini yaitu pihak berelasi sengaja melakukan hutang sehingga dalam pembagian dividen kepada pemegang saham menjadi lebih kecil dan laba juga menjadi rendah.

RPT sangat umum di wilayah Asia dimana banyak perusahaan besar yang terdaftar memiliki kelompok usaha. Selanjutnya, struktur kepemilikan di wilayah Asia termasuk Indonesia umumnya terkonsentrasi di tangan pendiri atau keluarga sebagai pemegang saham pengendalinya, karena itu jenis masalah keagenan yang timbul adalah masalah kekayaan pengambilalihan pemegang saham non pengendali oleh pemegang saham pengendali (Utama, 2015). Pengambil alihan kekayaan dengan cara mengendalikan pemilik dapat dilakukan melalui, antara lain adalah RPT

Hubungannya dengan teori keagenan yaitu adanya proses kontrak antara dua orang atau lebih dan masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak mencoba mendapatkan yang terbaik bagi dirinya. (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih principal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik principal ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymmetry information*) di antara *principal* dengan *agent*.

Akibat dari transaksi hutang hubungan istimewa yang tinggi membuat tarif pajak yang akan dibayar perusahaan menjadi rendah. Apabila perusahaan semakin banyak melakukan hutang, maka laba perusahaan yang diperoleh menjadi kecil akibatnya pajak yang akan dibayar juga kecil. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darma (2019) menyatakan bahwa RPT-Hutang tidak berpengaruh pada strategi penghindaran pajak.

2. Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap *Tax Aggressive*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan variabel Kepemilikan Terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressive* di Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen. Hal ini

ditunjukkan dengan angka signifikansi $0,245 > \alpha = 0,05$. Sedangkan $t_{hitung} = 1,180 < t_{tabel} 2,018$, sehingga hipotesis kedua Kepemilikan Terkonsentrasi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tidak mempunyai pengaruh terhadap *Tax Aggressive*.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya. Para pemegang saham cenderung mempercayakan pada manajerial untuk mengelola perusahaan agar profit perusahaan maksimal, internal perusahaan pasti lebih mengetahui kinerja perusahaan dari pada pemegang saham sehingga tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajerial perusahaan sepenuhnya dilakukan oleh internal perusahaan. Para pemegang saham mayoritas tidak mempengaruhi tindakan internal perusahaan dalam agresivitas pajak selama profit yang didapat para pemegang saham akan terus meningkat (Fahrani, Nurlaela, & Chomsatu, 2018).

Arifin (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama.

Penyebaran pemegang saham berperan dalam masalah keagenan yaitu pemegang saham yang semakin terkonsentrasi pada satu atau beberapa pemegang saham saja akan mempermudah kontrol terhadap kebijakan yang diambil pengelola perusahaan sehingga dapat mengurangi *asymmetric information* dan mengurangi tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer (Midiastuty, Suranta, & Ramdhan, 2017).

Hal ini berarti perbedaan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan tidak menentukan agresivitas pajak terhadap manajemen perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Fahrani, Nurlaela, & Chomsatu (2018) menyatakan kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Aggressive*.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressive* di Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen. Hal ini ditunjukkan dengan angka signifikansi $0,123 > \alpha = 0,05$. Sedangkan $t_{hitung} 1,575 < t_{tabel} 2,018$, sehingga hipotesis ketiga pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tidak mempunyai pengaruh terhadap *Tax Aggressive*.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu menjadi *controller* atas kegiatan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional yang besar memungkinkan untuk memutuskan sesuatu yang menguntungkan

kepentingan dirinya sendiri. Disamping itu untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dibutuhkan biaya. Dengan mengeluarkan biaya berarti telah mengurangi dana yang seharusnya diperoleh oleh pemilik institusional. Oleh sebab itu pemilik institusional tidak melakukan monitoring terhadap manajemen.

Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap manajemen yang lebih optimal (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Aktivitas penghindaran pajak tidak dapat di kontrol oleh pemilik institusional karena hanya berfokus pada investasinya agar investasinya tersebut menguntungkan. Sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional akan tetap terjadi agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Sartika (2012), kepemilikan institusional memiliki kelebihan sebagai berikut:

- Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Aggressive*.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax*

Aggressive pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen. Hal ini ditunjukkan dengan angka signifikansi $0,920 > \alpha = 0,05$. Sedangkan $t_{hitung} -0,101 < t_{tabel} 2,018$, sehingga hipotesis keempat pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel *Tax Aggressive*.

Komisaris independen sebagai bagian dari *corporate governance* turut berperan dalam perencanaan pajak perusahaan. Perencanaan pajak akan bermanfaat bagi perusahaan apabila perusahaan mempunyai *corporate governance* yang baik. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait (Winata, 2014).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perusahaan dengan proporsi komisaris independen kurang dari 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dengan lebih banyaknya dewan komisaris terafiliasi dibanding dengan komisaris independen maka proses monitoring terhadap manajer menjadi kurang efektif sehingga celah untuk melakukan tindakan agresivitas pajak semakin tinggi tindakan agresivitas pajak seharusnya dapat dikurangi dengan adanya komisaris independen. Hal ini dikarenakan pengangkatan komisaris independen sebagian berdasarkan atas penghargaan, hubungan keluarga dan nepotisme (Effendi, 2009).

Akibat dari masalah keagenan menyebabkan adanya sejumlah biaya yang harus dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Salah satunya adalah *bonding cost* yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan memastikan bahwa manajer dapat mengikuti keinginan dari pemegang saham, sehingga salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan karakteristik perusahaan (Midiastuty, Suranta, & Ramdhan, 2017).

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai komisaris independen seharusnya sangat ketat, antara lain memiliki integritas dan kompetensi yang memadai sehingga kinerja komisaris dapat lebih ditingkatkan sehingga penghindaran pajak dalam perusahaan dapat diminimalisir. Hal yang sama dikemukakan oleh Effendi (2009) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Aggressive*.

5. Pengaruh Komite Audit

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressive* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen. Hal ini ditunjukkan dengan angka signifikansi $0,044 < \alpha = 0,05$. Sedangkan $018 \text{ thitung} -2,077 < t_{\text{tabel}} 2,018$, sehingga hipotesis kelima pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen mempunyai pengaruh terhadap variabel *Tax Aggressive*.

Zarkasyi (2008) menyatakan komite audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap

manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Berjalannya komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Saputra & Asyik, 2017).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komite audit menunjukkan semakin banyak komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan *good corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga akan mengurangi tindakan agresivitas pajak. Untuk mengurangi kepentingan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen maka diperlukan *check* dan *balance* oleh komite audit sebagai suatu mekanisme pengawasan agar perusahaan taat terhadap peraturan perpajakan dapat mengurangi tindakan kecurangan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Keberadaan komite audit menjadikan perusahaan lebih bertanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan sehingga tindakan manajemen yang berhubungan dengan agresivitas pajak dapat diminimalisir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak CETR.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Related Party Transaction, Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tahun 2016-2019. Maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Variabel *Related Party Transaction* tidak berpengaruh terhadap Tax Aggressive pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tahun 2016-2019.
2. Variabel Kepemilikan Terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap Tax Aggressive pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen 2016-2019.
3. Variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Tax Aggressive pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tahun 2016-2019.
4. Variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Aggressive pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tahun 2016-2019.
5. Variabel Komite Audit berpengaruh terhadap Tax Aggressive pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif & Komponen tahun 2016-2019.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan disarankan tetap mentaati peraturan yang mengatur tentang kewajiban hubungan istimewa, sehingga fiskus dapat melakukan koreksi terhadap pajak yang dibayarkan.
2. Perusahaan disarankan agar terus menjaga reputasinya dengan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara perusahaan terkonsentrasi atau perusahaan keluarga membantu membayarkan pajak perusahaan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Perusahaan disarankan untuk mau menanggung resiko dengan adanya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen.
4. Perusahaan disarankan untuk menyeimbangkan dewan komisaris dengan dewan komisaris independen. Karena komisaris independen seharusnya dapat mengurangi adanya tindakan agresivitas pajak.
5. Perusahaan disarankan untuk memperbanyak komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan *good corporate governance*, sehingga akan mengurangi agresivitas pajak.

C. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan antara lain:

1. Penelitian hanya menggunakan periode 2016-2019

2. Penelitian ini hanya mampu membuktikan komite audit sebagai bagian dari *corporate governance* yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.
3. Jumlah sampel masih terbatas, yaitu hanya pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif & komponen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amril, A., Puspa, D. F., & Fauziati, P. (2015). Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013. *Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta* 7.
- Andri, M. (2017, Desember 19). *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*. Dipetik November 23, 2020, dari Perusahaan Cangkang, Celengan Sapi, dan Tax Avoidance:
- Arifin, Z. (2003). Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia. *Disertasi. Depok, Jakarta: Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia*.
- Aulia, H., Sumarno, & Indriasih, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Corporate Governance Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance (Pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universiitas Pancasakti Tegal*, 52-62.
- Azizah, N., & Kusmuriyanto. (2016). The Effect of Related Party Transactions on Tax Avoidance. 17-307.
- Boediono, G. (2005). Kualitas laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan dampak manajemen laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII Solo*.
- Bunaidi, C. P. (2013). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional , Proporsi Komisaris Independen , Dan Kualitas Audit Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak Serta Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan Jangka Pendek. *In Simposium Nasional Akuntansi XIV. Manado*.
- Butar Butar, S. (2007). *Modal Statistik dan Aplikasi SPSS*. Semarang: Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER), Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Journal Of Accounting Vol. 2, No. 2*, 1-10.

- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-family Firms? *Journal of Financial Economics*, Vol.95, 41-61.
- Damayanti , F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5, No. 2,* 187-206.
- Danang, S. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Darma , S. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Tangerang Selatan*, 58-75.
- Darmawan , G. H., & Sukarta, M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6, 143–161.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, Vol. 79, 145-179.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16, hal 702-732.
- Effendi, M. A. (2009). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. (Krista, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2018). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma Vol. 19*, 52-60.
- Farahmita, A. (2011). Apakah Transaksi Pihak Hubungan Istimewa Merupakan Insentif Untuk Melakukan Manajemen Laba? *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, 21-22.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 22*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss. *Semarang: Universitas Diponegoro*.
- Gordon, E. A., & Henry, E. (2016). Related Party Transactions dan Earnings Management. . *International Soft Science Conference*,, 46–52.
- Gusnardi. (2009). Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan. *Jurnal Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1 No.1: 36-43.
- Gustiandika, T., & Hadiprajitno, P. B. (2014). Pengaruh Keputusan Investasi Dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating . *Diponegoro Journal Of Accounting Volume.3, No.2*, 1-12.
- Hanum, H. R. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang*.
- IAI. (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2015, 8 27). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.7, pengungkapan pihak-pihak berelasi*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Jensen , M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Financial Economics Vol. 3 No. 4*, 305-360.
- Jian, M., & Wong, T. J. (2004). Earnings management and tunneling through related party transactions: Evidence from Chinese corporate groups. *SSRN Electronic Journal*.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristianto, A. B., & Ardy. (2015). Faktor Finansial Dan Non Finansial Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 15 (1)*, 31–48.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. M. (2013). Pengaruh Return Turn On Asset (ROA), Laverage, Coorporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi, Volume 18*.
- Luke, & Zulaikha. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing 13 (1)*, 80–96.

- Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Ramdhan, P. M. (2017). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember, 2017*, 1-26.
- Morck, R., & Bernard, Y. (2004). Special Issues Relating to Corporate Governance & Family Control. *World Bank Policy Research Working Paper No. 3406*.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi, XVIII(03)*, 408–421.
- OJK. (2014). *Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014.
- Okrayanti, T. Y., Utomo, S. W., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Vol. 5, No.1*, 804-817.
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram*, 1-27.
- Prameswari, F. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3 Issue 4 (2017)*, 74-90.
- Ridha, M., & Martani, D. W. (2014). Analisis Terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan , Kepemilikan Keluarga , Dan Tata Kelola Perusahaan Di Indonesia. *SNA 17 Mataram, Lombok*, 1–22.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. . *JAAI, 19*, 85–98.
- Saputra, M. D., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 8*, 01-19.
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Ownership Characteristics, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness. *The 3rd International Accounting Conference and The 2nd Doctoral Colloquium*, 1-19.

- Sari, N., Kalbuana, N., & Jumadi, A. (2016). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 431-440.
- Sartika, W. (2012). Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok*.
- Sehon, W. (2008). Tax and Corporate Governance A Legal Approach MPC Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law. *Springer, Berlin, Heidelberg*.
- Simposium Nasional Akuntansi. (2018). *Peranan Related Party Transaction dan Manajemen Laba dalam Menurunkan Agresivitas Pajak*. Samarinda: Simposium Nasional Akuntansi.
- Sokarina, A. (2012). Kualitas Auditor, Besaran Transaksi Antar Pihak Yang Berhubungan Istimewa Dan Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma 3 (April)*, 35-47.
- Sunyoto, D. (2007). *Metodologi Penelitian Akuntansi, cetakan kesatu*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suyanto, K. D. (2012). Pengaruh likuiditas, leverage, komisaris independen dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1*, 47–62.
- Syafri Harahap, S. (2008). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utama, C. A. (2015). Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, Dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia 12 (1)*, 37–54.
- Wibawa, A. W., & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 11, No. 1*, 1-9.

- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 181-192.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review Vol. 4, No.1*, 1-11.
- Yuliati, R. (2016). Pengaruh Transaksi Transfer Pricing dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang*, 5-6.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zarkasyi, M. W. (2008). *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya (1st ed.)*. Bandung. CV Alfabeta.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR OTOMOTIF & KOMPONEN YANG MASUK DALAM SAMPEL PENELITIAN

No.	Kode	Nama Perusahaan
1.	ASII	Astra Internasional Tbk
2.	AUTO	Astra Otoparts Tbk
3.	BOLT	Garuda Metalindo Tbk
4.	BRAM	Indo Kordsa Tbk
5.	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk
6.	GJTL	Gajah Tunggal Tbk
7.	IMAS	Indomobil Sukses Internasional
8.	INDS	Indospring Tbk
9.	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
10.	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk
11.	PRAS	Prima alloy steel Universal Tbk
12.	SMSM	Selamat Sempurna Tbk

LAMPIRAN 2

DATA VARIABEL *RELATED PARTY TRANSACTION*, KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN *TAX AGGRESSIVE*.

2. *RELATED PARTY TRANSACTION* TAHUN 2016-2019

KODE BANK	TAHUN	RELATED PARTY TRANSACTION
		DECIMAL
ASII	2016	0,0299305
	2017	0,0266012
	2018	0,024808
	2019	0,0229789
AUTO	2016	0,1159929
	2017	0,094673
	2018	0,1213187
	2019	0,1256399
BOLT	2016	0,0549469
	2017	0,0184653
	2018	0,024031
	2019	0,020649
BRAM	2016	0,0366783
	2017	0,0221326
	2018	0,1211701
	2019	0,2081739
GDYR	2016	0,035928
	2017	0,0329809
	2018	0,037289
	2019	0,0514174
GJTL	2016	0,0292433
	2017	0,0190112
	2018	0,0023455
	2019	0,0086526
IMAS	2016	0,0407989
	2017	0,0592964
	2018	0,0673579
	2019	0,0265077
INDS	2016	0,072241
	2017	0,1945865
	2018	0,1943089

	2019	0,1459391
LPIN	2016	0,0548354
	2017	0,4006619
	2018	0,4688949
	2019	0,3312406
MASA	2016	1,0929517
	2017	1,5903365
	2018	0,3199815
	2019	0,8235145
PRAS	2016	0,3630767
	2017	0,0052832
	2018	0,0529125
	2019	0,0972613
SMSM	2016	0,0485856
	2017	0,0497808
	2018	0,0728209
	2019	0,0732671

3. KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI TAHUN 2016-2019

KODE BANK	TAHUN	KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI
		DECIMAL
ASII	2016	0,5011
	2017	0,5011
	2018	0,5011
	2019	0,5011
AUTO	2016	0,8
	2017	0,8
	2018	0,8
	2019	0,8
BOLT	2016	0,576
	2017	0,576
	2018	0,576
	2019	0,576
BRAM	2016	0,6021
	2017	0,607
	2018	0,6159
	2019	0,6159
GDYR	2016	0,85
	2017	0,85

	2018	0,8571
	2019	0,8611
GJTL	2016	0,5
	2017	0,5
	2018	0,5
	2019	0,5
IMAS	2016	0,7149
	2017	0,7149
	2018	0,7149
	2019	0,7149
INDS	2016	0,8811
	2017	0,8811
	2018	0,8811
	2019	0,8811
LPIN	2016	0,83
	2017	0,8682
	2018	0,8171
	/2019	0,8171
MASA	2016	0,5402
	2017	0,6268
	2018	0,5218
	2019	0,9964
PRAS	2016	0,54
	2017	0,54
	2018	0,54
	2019	0,54
SMSM	2016	0,5813
	2017	0,581
	2018	0,581
	2019	0,5813

4. KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TAHUN 2016-2019

KODE BANK	TAHUN	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
		DECIMAL
ASII	2016	1,9954182
	2017	1,9954182
	2018	1,9954182
	2019	1,9954182

AUTO	2016	1,25
	2017	1,25
	2018	1,2521845
	2019	1,2527192
BOLT	2016	2,2521723
	2017	2,2256711
	2018	2,2367125
	2019	2,2316754
BRAM	2016	0,1660987
	2017	1,6474273
	2018	1,6236509
	2019	1,6236509
GDYR	2016	1,1767059
	2017	1,1767059
	2018	1,1667931
	2019	1,1767059
GJTL	2016	2,0202062
	2017	2,0202062
	2018	2,0202062
	2019	2,0202062
IMAS	2016	1,3988903
	2017	1,3988903
	2018	1,3988903
	2019	1,3988903
INDS	2016	1,1349674
	2017	1,1349674
	2018	1,1349674
	2019	1,1349674
LPIN	2016	1,206461
	2017	1,1518539
	2018	1,2239148
	2019	1,2239148
MASA	2016	1,7536819
	2017	1,5954954
	2018	1,9167366
	2019	3,9765327
PRAS	2016	1,8851852
	2017	1,8851852
	2018	1,8851852

	2019	1,8851852
SMSM	2016	1,7204126
	2017	1,7204128
	2018	1,5401942
	2019	1,6560361

5. KOMISARIS INDEPENDEN TAHUN 2016-2019

KODE BANK	TAHUN	KOMISARIS INDEPENDEN
		%
ASII	2016	0,33
	2017	0,38
	2018	0,3
	2019	0,3
AUTO	2016	0,37
	2017	0,37
	2018	0,37
	2019	0,37
BOLT	2016	0,33
	2017	0,33
	2018	0,33
	2019	0,33
BRAM	2016	0,4
	2017	0,4
	2018	0,4
	2019	0,4
GDYR	2016	0,33
	2017	0,33
	2018	0,33
	2019	0,33
GJTL	2016	0,22
	2017	0,25
	2018	0,33
	2019	0,43
IMAS	2016	0,43
	2017	0,43
	2018	0,43
	2019	0,5

INDS	2016	0,33
	2017	0,33
	2018	0,33
	2019	0,33
LPIN	2016	0,33
	2017	0,33
	2018	0,67
	2019	0,4
MASA	2016	0,4
	2017	0,4
	2018	0,28
	2019	0,41
PRAS	2016	0,33
	2017	0,33
	2018	0,33
	2019	0,33
SMSM	2016	0,33
	2017	0,33
	2018	0,33
	2019	0,33

5. KOMITE AUDIT TAHUN 2016-2019

KODE BANK	TAHUN	KOMITE AUDIT
		NOMINAL
ASII	2016	4
	2017	4
	2018	3
	2019	3
AUTO	2016	3
	2017	3
	2018	5
	2019	4
BOLT	2016	3
	2017	4
	2018	5
	2019	5
BRAM	2016	3
	2017	4
	2018	4

	2019	5
GDYR	2016	4
	2017	3
	2018	3
	2019	5
GJTL	2016	4
	2017	3
	2018	3
	2019	5
IMAS	2016	4
	2017	4
	2018	3
	2019	5
INDS	2016	4
	2017	3
	2018	3
	2019	4
LPIN	2016	5
	2017	5
	2018	4
	2019	3
MASA	2016	3
	2017	3
	2018	4
	2019	5
PRAS	2016	4
	2017	5
	2018	4
	2019	3
SMSM	2016	5
	2017	5
	2018	4
	2019	3

6. *TAX AGGRESSIVE* TAHUN 2016-2019

KODE BANK	TAHUN	<i>TAX AGGRESSIVE</i>
		DECIMAL
ASII	2016	-0,7506815
	2017	-0,684934

	2018	-0,6618801
	2019	-0,661004
AUTO	2016	-0,5930958
	2017	-0,6371868
	2018	-0,6946899
	2019	-0,6237119
BOLT	2016	-0,5627343
	2017	-0,5666323
	2018	-0,5791533
	2019	-0,5907891
BRAM	2016	-0,5504434
	2017	-0,5545723
	2018	-0,5453066
	2019	-0,5376103
GDYR	2016	-0,4461618
	2017	-0,3733863
	2018	-0,2936844
	2019	-1,4504749
GJTL	2016	-0,6172575
	2017	-0,2377085
	2018	-0,8899009
	2019	-0,3848172
IMAS	2016	-0,4205081
	2017	-0,3635031
	2018	-0,7202112
	2019	-1,1549964
INDS	2016	-0,7545247
	2017	-0,5357151
	2018	-0,5985502
	2019	-0,6577334
LPIN	2016	-1,737791
	2017	-1,7890481
	2018	-1,1697355
	2019	-1,3332284
MASA	2016	-0,715038
	2017	-0,9535515
	2018	-0,5928599
	2019	-0,6671246
PRAS	2016	-0,2247494

	2017	-0,2565452
	2018	-0,6558233
	2019	-0,7239822
SMSM	2016	-0,625194
	2017	-0,6395757
	2018	-0,6287426
	2019	-0,6515752

LAMPIRAN 3

HASIL ANALISIS

1. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Related Party Transaction	48	,0023455	1,5903365	,165239578	,2948701116
Kepemilikan Terkonsentrasi	48	,5000000	,9964000	,671952083	,1476120115
Kepemilikan Institusional	48	,1660987	3,9765327	1,627774767	,5454924390
Komisaris Independen	48	,2200000	,6700000	,358958333	,0678935206
Komite Audit	48	3,0000000	5,0000000	3,895833333	,8052905735
Tax Aggressive	48	-1,7890481	-,2247494	-,688710917	,3350927795
Valid N (listwise)	48				

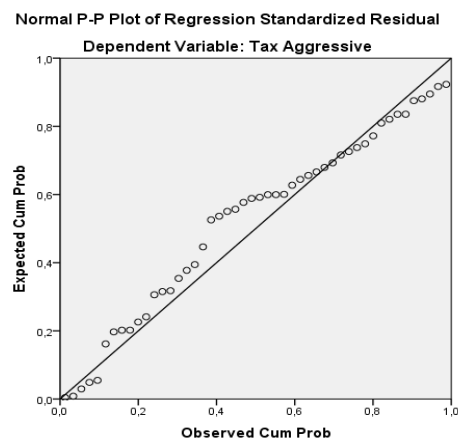
2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,29258866
Most Extreme Differences	Absolute		,152
	Positive		,066
	Negative		-,152
Test Statistic			,152
Asymp. Sig. (2-tailed)			,007 ^c

Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,199 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,189
		Upper Bound	,210

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1502173562.



b. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,099	,403			
Related Party Transaction	-,300	,170	-,264	,807	1,239
Kepemilikan Terkonsentrasi	-,406	,344	-,179	,790	1,265
Kepemilikan Institusional	,154	,098	,250	,720	1,388
Komisaris Independen	-,074	,732	-,015	,826	1,211
Komite Audit	-,126	,061	-,303	,853	1,173

- a. Dependent Variable: Tax Aggressive

c. Uji Autokorelasi

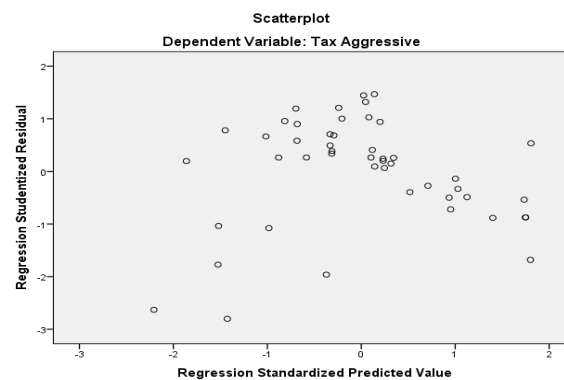
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,487 ^a	,238	,147	,3095150514	1,317

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Terkonsentrasi, Related Party Transaction, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Tax Aggressive

d. Uji Heteroskedasitas



3. Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,099	,403		-,245	,808		
Related Party Transaction	-,300	,170	-,264	-1,760	,086	,807	1,239
Kepemilikan Terkonsentrasi	-,406	,344	-,179	-1,180	,245	,790	1,265
Kepemilikan Institusional	,154	,098	,250	1,575	,123	,720	1,388
Komisaris Independen	-,074	,732	-,015	-,101	,920	,826	1,211
Komite Audit	-,126	,061	-,303	-2,077	,044	,853	1,173

a. Dependent Variable: Tax Aggressive

4. Uji Hipotesis

a. Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,254	5	,251	2,618	,038 ^b
Residual	4,024	42	,096		
Total	5,277	47			

a. Dependent Variable: Tax Aggressive

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Terkonsentrasi, Related Party Transaction, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

b. Uji Secara Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,099	,403		-,245	,808
Related Party Transaction	-,300	,170	-,264	-1,760	,086
Kepemilikan Terkonsentrasi	-,406	,344	-,179	-1,180	,245
Kepemilikan Institusional	,154	,098	,250	1,575	,123
Komisaris Independen	-,074	,732	-,015	-,101	,920
Komite Audit	-,126	,061	-,303	-2,077	,044

a. Dependent Variable: Tax Aggressive

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,487 ^a	,238	,147	,3095150514	1,317

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Terkonsentrasi, Related Party Transaction, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Tax Aggressive